

KELESTARIAN LINGKUNGAN HUTAN BERBASIS *ECOLOGICAL CITIZENSHIP* DI DESA SUMBERJO KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN

Heny Kurniasari

(PPKn, FISH, UNESA) Heny7320@gmail.com

I Made Suwanda

(PPKn, FISH, UNESA) madesuwanda@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelestarian lingkungan hutan di desa Sumberjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan teori behavior-setting (setting perilaku) yang dipelopori oleh Robert Barker dan Alan Wicker. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Teknik dalam penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, adapun informan dalam penelitian ini adalah : Ketua LMDH atau Perhutani di desa Sumberjo, Kepala desa Sumberjo, perangkat desa Sumberjo dan warga desa Sumberjo. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pemerintah desa bersama Perum Perhutani telah berupaya mengatasi permasalahan alam yang terjadi di desa Sumberjo dengan melalui beberapa program seperti bantuan bibit pohon oleh Perum Perhutani, sistem tebang tanam daerah pembukaan lahan hutan, penanaman pohon di tepi jalan, bersih-bersih lingkungan, sosialisasi kebersihan lingkungan, Perdes (Peraturan Desa) tentang pembuatan sumur bur, pembuatan Green House, edukasi penanaman pohon pada anak, dan pembuatan pompa air bersih. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama Perhutani dalam mengatasi permasalahan alam serta menciptakan warga negara yang sadar lingkungan atau disebut dengan ecological citizenship di desa Sumberjo belum berjalan. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masyarakat terkait kelestarian lingkungan masih kurang dan didukung kurangnya ketegasan dari pemerintah desa dan Perum Perhutani dalam menerapkan sanksi yang tegas bagi warga yang tidak mengikuti program-program ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak terkait dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga permasalahan alam dan bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia masih terjadi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan ecological citizenship di desa Sumberjo belum berjalan.

Kata Kunci: kelestarian lingkungan hutan, ecological citizenship

Abstract

This study aims to describe the sustainability of the forest environment in Sumberjo Village, Widang District, Tuban Regency. This research uses behavior-setting theory, which was pioneered by Robert Barker and Alan Wicker. Judging from the type of data, this research approach uses a qualitative approach with a case study research design. The technique in determining the informants used purposive sampling technique, while the informants in this study were: Head of LMDH or Perhutani in Sumberjo village, Sumberjo village head, Sumberjo village officials and Sumberjo village residents. Data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation. The results of this study the village government together with Perum Perhutani have attempted to overcome natural problems that occur in Sumberjo village through several programs such as tree seed assistance by Perum Perhutani, cutting and planting systems for forest clearing areas, planting trees on the side of the road, cleaning the environment, socialization environmental cleanliness, Village Regulations (Village Regulations) on making boreholes, making Green Houses, educating children about tree planting, and making clean water pumps. The efforts that have been made by the village government together with Perhutani in overcoming natural problems and creating environmentally conscious citizens or what is known as ecological citizenship in Sumberjo village have not worked. This is because public understanding regarding environmental sustainability is still lacking and is supported by a lack of firmness from the village government and Perum Perhutani in applying strict sanctions for residents who do not participate in programs or activities organized by related parties in protecting and preserving the environment, resulting in natural problems. and natural disasters caused by human behavior still occur. From this, it can be concluded that ecological citizenship in Sumberjo village has not yet been implemented.

Keywords: forest environmental sustainability, ecological citizenship

PENDAHULUAN

Hutan Indonesia merupakan hutan terluas yang menduduki urutan ketiga di dunia dengan sumbangan hutan tropis dan hutan hujan (*rain forest*) Kalimantan dan Papua. Menurut data *Forest Watch Indonesia (FWI)*,

sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan (Siswanto dkk,2020:118). *Senior Advisor for Terrestrial Policy, The Nature Conservancy*, dan Wahjudi Wardoyo menyatakan bahwa energi

mikrobiologi menjadi generasi kedua dan ketiga sumber energi yang ada di Dunia. Energi mikrobiologi hanya bisa ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati (Cipta,2019:02). Keanekaragaman hayati hutan menjadi suatu prestasi yang membanggakan mengingat hutan sebagai salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem bumi. Hutan tropis di Indonesia banyak menyimpan potensi energi mikrobiologi yang begitu diperlukan dunia. Sumber daya alam yang besar tersebut tentu perlu dikelola dengan baik dan bertanggung jawab guna menjamin keberlanjutan pembangunan generasi (Utami, 2015:175)

Hutan menjadi sumber daya alam yang memberikan manfaat sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat, sumber daya yang bisa dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Putra (2016:01), Hutan memiliki keanekaragaman berbentuk sumberdaya yang dapat memberikan manfaat besar untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk manfaat atau fungsi seperti ekonomi, manfaat klimatologis, manfaat hidrolis, dan ekologis. Manfaat ekonomi dapat berbentuk hasil hutan sehingga dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi, Manfaat klimatologis yaitu hutan sebagai pengatur iklim, manfaat hidrolis yaitu bisa menampung curah air hujan dan menjadi pengatur tata air di dalam tanah ataupun penyerapan air, dan fungsi ekologis adalah mencegah terjadinya erosi dan banjir, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Hutan sebagai paru-paru dunia yang dapat menyimpan air dalam volume yang sangat besar mengantisipasi terjadinya tanah longsor, sebagai tempat wisata, riset dan pendidikan serta hasil hutannya dapat dijual baik di dalam ataupun luar negeri dan lain-lain. Namun pada kenyataannya dalam hal ini manusia kurang begitu sadar dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan, manusia hanya mengambil dan mengeksploitasi tanpa melihat dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang, sehingga perlunya kesadaran terhadap individu maupun kelompok dalam menjaga lingkungan hutan serta membatasi penggunaan sumber daya alam hutan guna kelangsungan hidup yang akan datang. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hutan terjadi di desa Sumberjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang memiliki hutan dikecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan luas desa Sumberjo 12,59 KM² (Buwono,2020:02). Hasil observasi pada 10 Oktober 2020 kemarin, Sugondo ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Wono Asri desa Sumberjo menyatakan bahwa desa Sumberjo memiliki hutan seluas 590 hektar yang terdiri dari 30% hutan siap garap, 30%

hutan siap tebang dan 40% hutang lindung. dari hutan yang cukup luas tersebut maka sebagian masyarakatnya bertani dan berkebun dengan memanfaatkan tanah dan hasil hutan. Membuka lahan daerah hutan untuk berkebun seperti menanam komoditi sayuran dan mengurangi pohon-pohon di area hutan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup menjadi salah satu cara (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) LMDH Wono asri desa Sumberjo bersama Perhutani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sumberjo dalam bidang ekonomi. Ketika setiap tahunnya pembukaan lahan di hutan desa Sumberjo terus meningkat maka akan menyebabkan hutan gundul. Pemanfaatan hutan secara berlebihan akan berdampak buruk terhadap lingkungan yang ada disekitarnya serta menurunnya kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan sekitar hutan baik secara langsung ataupun tidak langsung, Perlakuan manusia terhadap alam yang tidak menjaga ekosistem suatu saat akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi diri manusia sendiri, seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, terganggunya siklus air, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, polusi dan lain-lain. Seperti halnya sekarang di desa Sumberjo akibat dari rusaknya ekosistem yang ada di hutan banyak hewan-hewan yang tinggal di hutan punah hingga tidak ada, sumber mata air yang ada di sungai hilang, sumur-sumur warga desa sebagian besar kering, hingga pada saat ini sering terjadi kekeringan panjang di desa Sumberjo. Dari dampak tersebut seharusnya dapat menyadarkan manusia agar memanfaatkan hutan secara bijak, menjaga dan melestarikannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa kewajiban warga negara dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan sekitar yang sering dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) belum terpenuhi, perlunya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan khususnya hutan dengan salah satunya melalui pembentukan karakter. Pembentukan karakter warga negara adalah suatu upaya terkait dengan pengembangan multi aspek keunggulan bangsa sehingga suatu bangsa tidak terombang-ambing dalam pencarian dirinya. Karakter peduli lingkungan harus benar-benar ditanamkan pada setiap individu karena pada hakikatnya karakter warga negara peduli lingkungan berfungsi untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa. Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan suatu bentuk dari suatu identitas sosial politik (*a form of social political identity*) seseorang yang keberadaannya berkaitan erat dengan waktu yang berkembang (Derek Heater dalam Kurniawan,2018). Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam pelestarian alam. Hak

pelestarian alam warga negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak untuk ikut serta dalam upaya pelestarian alam termuat dalam pasal 65 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selain memiliki hak dalam pengelolaan lingkungan hidup, warga negara juga memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat, seperti yang tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang sehat dan baik”. hal tersebut ketika warga negara telah memenuhi hak dan kewajiban dalam pelestarian lingkungan maka dapat dikatakan warga negara yang telah peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. (Hariyanto dalam Gusmadi, 2018:109)

Gagasan baru terkait karakter peduli lingkungan yang diupayakan untuk menciptakan kesadaran warga negara dalam membentuk manusia seutuhnya dalam keterlibatan menjaga pelestarian lingkungan hidup merupakan hakikatnya kewarganegaraan ekologis (Isin dan Turner dalam Mariyani, 2017:11). pentingnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat dalam kelestarian alam sehingga dapat mengaplikasikan dalam bentuk perilaku yang peduli terhadap lingkungan. menurut Nugroho (2017:18) Kepedulian antar warga berlandaskan jiwa gotong royong merupakan salah satu bentuk kesalehan sosial di masyarakat. Kepedulian masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satu bidang kehidupan yang membutuhkan kepedulian masyarakat yaitu bidang penanggulangan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, seharusnya masyarakat dapat turut aktif bergotong royong dengan pemerintah bersama institusi lingkungan terkait dalam penanggulangan lingkungan hidup agar dapat terciptanya kewarganegaraan ekologi di masyarakat. Hakikat pentingnya membentuk *ecological citizenship* melalui komitmen pribadi agar belajar lebih banyak tentang lingkungan yang selanjutnya mampu mengambil tindakan dalam menjaga, mengelola ataupun melestarikan lingkungan yang bertanggung jawab (Szerszynski 2006:75).

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam suksesi kehidupan, baik ditinjau dalam pandangan ekonomi, edukasi, social kemasyarakatan selalu berinteraksi sebagai makhluk sosial diperlukan lingkungan yang

memadai (Azwir dkk, 2017:45) oleh karena itu dalam menciptakan *ecological citizenship* sangat dibutuhkan partisipasi daripada masyarakat itu sendiri. Selain peran dari masyarakat peran pemerintah juga sangat penting dalam mempromosikan peran warga negaranya, hal tersebut dikarenakan pemerintah mempunyai alat yang bersifat memaksa, mengikat dan memberikan sanksi kepada warga negaranya untuk menjaga lingkungan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Barry (2006:21) bahwa kampanye berbasis negara sangat efektif untuk mempromosikan kewarganegaraan lingkungan tanpa mengabaikan dimensi social ekonomi dan politik dari keberlanjutan. Kenyataannya, di beberapa negara salah satunya di Indonesia membuktikan bahwa kurangnya perhatian lebih yang diberikan oleh pemerintah untuk menempatkan isu lingkungan dalam konteks yang lebih luas dalam kehidupan warga negaranya. faktor yang menghambat terbentuknya warga negara ekologi adalah kurangnya keadilan yang diberikan kepada aktor perusak lingkungan seperti struktur kekuasaan dan ekonomi kapitalis yang menjadi aktor dalam menimbulkan permasalahan ekologi dan sosial. Faktor ketidakadilan tersebut juga di perkuat oleh Luque (2005:221) yang menunjukkan bahwa warga negara menjadi tidak peduli dengan informasi yang disampaikan pemerintah terkait krisis ekologi dikarenakan warga negara mengidentifikasi terjadinya ketidakadilan mengenai kekuasaan perusahaan kapitalis yang tidak memberikan kontribusi dalam menangani krisis ekologi namun lepas tanggung jawab terhadap akibat yang telah ditimbulkan di lingkungan. Sistem pendidikan melalui lembaga sekolah dan peran serta masyarakat juga masih sangat minim terhadap pembahasan untuk pembentukan kewarganegaraan ekologis. Hal ini dikarenakan instansi pendidikan masih dibebankan pada upaya pembentukan pengetahuan dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup. Campur tangan dari pemerintah yang dibutuhkan guna menyadarkan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan yaitu peran dari pemerintahan desa Sumberjo yang memiliki pengetahuan lebih tentang kelestarian lingkungan hutan beberapa diantaranya Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), atau Kepala Desa beserta Perangkatnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Serlina Candra Wardina Sari dkk, (2020; 87-107) dimana Sinergi antara masyarakat dan pemerintah harus secara terbuka dan interaktif dalam mewujudkan ketahanan lingkungan di Kampung Gambiran sehingga hasil dari kewarganegaraan ekologis sebagai wujud ketahanan lingkungan membawa dampak positif di beberapa bidang, seperti: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Setiawan Gusmadi dan Samsuri, (2019; 381-392) yang berjudul

Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas bentuk kegiatan gerakan kewarganegaraan ekologis dan pembentukan karakter peduli lingkungan. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Gerakan kewarganegaraan ekologis dilakukan melalui gerakan reklamasi pasca penambangan, gerakan penanaman bakau (mangrove), gerakan perlawanan, gerakan aksi peduli sampah. Upaya pembentukan karakter peduli lingkungan ditanamkan melalui pendidikan lingkungan pada masyarakat dan siswa di sekolah, penegakan hukum yang jelas untuk perusahaan pertambangan, dan kampanye melalui media sosial mengenai kondisi lingkungan.

Penelitian yang sama yang berjudul Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban dalam Mengembangkan *ecological citizenship* (Nurmayanti, 2017:83-97). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Yayasan Mangrove Center Tuban dalam mengembangkan *ecological citizenship* pada masyarakat Tuban. Penelitian yang dilakukan oleh Ida relevan karena sama-sama ingin mengetahui strategi yang dilakukan oleh organisasi tertentu dalam mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap lingkungan atau disebut dengan *ecological citizenship*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengembangan *ecological citizenship* Yayasan Mangrove Center Tuban diwujudkan melalui pelaksanaan program-program kerja yang meliputi program konservasi dan pembibitan, program pemberdayaan *ecogreen* dan program pembinaan sekolah peduli lingkungan. Program-program dalam pengembangan *ecological citizenship* tersebut dapat terlaksana karena adanya program kemitraan serta sosok ketua Yayasan yang selalu memberikan teladan kepada para anggota dan masyarakat. Selain itu hasil dari strategi pengembangan *ecological citizenship* dalam masyarakat Tuban adalah terjalinnya hubungan baik antara manusia dan alam melalui kegiatan konservasi, kehidupan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan dan masyarakat memiliki kepedulian serta kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga program-program yang dilaksanakan Yayasan Mangrove Center telah berhasil dalam mengembangkan *ecological citizenship* pada masyarakat Tuban.

Upaya dalam menciptakan kewarganegaraan *ecological citizenship* juga dilakukan oleh Raudlatul Jannah yang berjudul Menciptakan Kewarganegaraan Ekologis Di Era Digital Melalui Kampong *Recycle*

(Jannah, 2018; 14-26). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun kewarganegaraan ekologis melalui gagasan Kampong *Recycle*. Penelitian ini relevan karena sama-sama dalam mewujudkan kewarganegaraan ekologi. Dalam upayanya, Kampong *Recycle* menerapkan beberapa strategi. Pertama, menerapkan trilogi konsep (*eco-structures, eco-literacy dan ecopreneurship*). Ketiga konsep ini saling berkaitan satu sama lain, meskipun *eco-literacy* menjadi kunci terpenting membangun kesadaran masyarakat. Kedua, melibatkan generasi muda baik mahasiswa relawan yang ingin terlibat dalam Kampong *Recycle* maupun aktivis GenBI yang aktif mensosialisasikan gagasan Kampong *Recycle* sejak awal. Ketiga, penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan jaringan Kampong *Recycle*. Keempat, penggunaan media internet seperti website dan youtube untuk penyebarluasan gagasan. Strategi ini dilakukan dalam upaya membangun kesadaran, etika dan moral warga negara terhadap lingkungannya khususnya terkait masalah sampah. Harapannya adalah terwujudnya perilaku bertanggungjawab dalam mengelola dan melestarikan lingkungan pada setiap warga negara.

Penelitian ini Pemerintah desa, LMDH berkerjasama dengan Perum Perhutani selaku perusahaan milik negara yang bergerak di bidang kehutanan dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) sehingga dapat mendorong terbentuknya warga negara yang peduli terhadap lingkungan. Hakikat pentingnya membentuk warga negara ekologi melalui komitmen pribadi untuk belajar lebih banyak dan luas terkait lingkungan kemudian mampu mengambil tindakan dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan yang bertanggung jawab (Szerszynski 2006:75). Dari permasalahan ini dibutuhkan peran dari pemerintahan desa agar dapat memberikan kesadaran dan dukungan kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan alam hutan agar menjadikan warganegara yang pemikirannya dan perilakunya berkaitan erat dengan tata cara etika dan moral warga negara terhadap lingkungan atau disebut dengan *ecological citizenship*. Dari situ fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional sehingga kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa kewajiban warganegara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hutan sangat penting, kelestarian yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Odum yaitu pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan hidup yang berkelanjutan dengan melibatkan warga desa agar memenuhi

kewajiban sebagai warganegara yang sadar terhadap lingkungan khususnya lingkungan sekitar hutan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kelestarian lingkungan hutan berbasis *ecological citizenship* di desa Sumberjo kecamatan Widang kabupaten Tuban. sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kelestarian lingkungan hutan di desa Sumberjo kecamatan Widang kabupaten Tuban dan mendeskripsikan berlaku atau tidaknya *ecological citizenship* di desa Sumberjo kecamatan Widang kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan teori yang didasarkan atas pandangan ekologis adalah teori *behavior-setting* (*setting* perilaku) yang dipelopori oleh Robert Barker dan Alan Wicker. Hubungan antara manusia-lingkungan lebih dijelaskan dari sisi sifat atau karakteristik sosial seperti kebiasaan, aturan, aktivitas tipikal, dan karakteristik fisik. Dengan mengetahui *setting* tempat maka dapat diprediksikan perilaku/aktivitas yang terjadi (Gifford, 1987; Veitch & Arkkelin, 1995 dalam Avin Fadilla Helmi, 1999:14). Teori ekologi ini menekankan pada kesesuaian program lingkungan yang diberikan oleh pihak terkait dengan perilaku masyarakat yang diterapkan dalam lingkungan tersebut.

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk mengembangkan paparan konsep yang berkaitan dengan *ecological citizenship*, memberi pemahaman kepada masyarakat akan pelestarian lingkungan dan menyadarkan masyarakat sendiri akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan alam agar lingkungan tetap bersih dan tidak terjadi kerusakan, dan agar menjadi warganegara yang peduli terhadap lingkungan atau disebut dengan *ecological citizenship*. Dan penelitian ini diharapkan memberi pandangan bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah dapat membuat sanksi yang tegas terhadap pejabat desa ataupun pihak yang kopeten dibidang pelestarian hutan yang tidak menjalankan perannya dengan baik dan pemerintah membuat kebijakan baru terkait profesi pemerintahan hutan dan desa yang professional dimana menuntut agar mempunyai pemikiran kritis dan tanggap terhadap permasalahan yang ada diwilayah desa hutan serta inovatif dalam pelestarian desa hutan.

METODE

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam berbagai kondisi dan situasi yang muncul di masyarakat atau di tempat yang menjadi obyek penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mengacu pada pendapat Stake (2012:412) adalah

mengungkapkan keunikan dan kekhasan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang akan diteliti. Penggunaan desain penelitian studi kasus ini dipilih karena penelitian ini akan mengungkapkan secara mendalam tentang kewarganegaraan ekologi di desa Sumberjo, apakah pemahaman terkait pelestarian lingkungan hutan di desa Sumberjo berjalan dengan baik atau tidak, serta mengungkapkan program kerja dan hasil implemetasi program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dan hutan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan.

Teknik dalam penentuan informan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono dalam Ukun Sukwana, 2017:57). Populasi penelitian di Sumberjo tidak semua dapat dijadikan sebagai informan, jadi harus mempertimbangkan beberapa kategori agar dapat dijadikan informan. kriteria yang tepat untuk dijadikan informan penelitian ini yaitu orang-orang yang benar-benar kompeten dalam bidang pendidikan kelestarian hutan ataupun lingkungan hidup. informan dalam penelitian ini adalah : Ketua LMDH atau Perhutani di desa Sumberjo, Kepala desa Sumberjo, perangkat desa Sumberjo dan warga desa Sumberjo.

Penelitian ini, memfokuskan pada kewarganegaraan ekologi di desa Sumberjo kecamatan Widang kabupaten Tuban. selain itu untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dan hutan di desa Sumberjo sebagai penggerak dalam memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar menjadi kewarganegaraan ekologi. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana kewarganegaraan ekologi berjalan di desa Sumberjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan di desa Sumberjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan hutan dalam memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar menjadi kewarganegaraan ekologi, mengetahui berjalan atau tidaknya regulasi tentang kelestarian hutan di desa Sumberjo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, dan terkait apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintahan desa dan hutan sebagai penggerak masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hutan.

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi, tujuan dari observasi untuk mengetahui situasi dan kondisi kelestarian lingkungan hutan berbasis *ecological citizenship* di desa Sumberjo, Selain itu untuk mengetahui subjek penelitian yang berkompeten dalam pendidikan pelestarian lingkungan hutan sehingga data yang diperoleh tepat sasaran. Wawancara mendalam, yaitu dengan melakukan penggalian informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas. Maksud hal tersebut yaitu dengan masalah dan fokus penelitian yang diarahkan pada pusat penelitian serta informan harus terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara ini berupa interview secara mendalam kepada kepala desa Sumberjo, perangkat desa Sumberjo, ketua LMDH beserta perhutani dan warga desa sumberjo. Dokumentasi, dijadikan sebagai bukti bahwa data yang disajikan di dalam penelitian ini valid, sesuai dengan fakta lapangan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan Miles (dalam Sugiyono, 2011 : 246). Pendekatan untuk menganalisis data didapatkan dalam penelitian ini terbagi dalam langkah-langkah sebagai berikut yaitu pengumpulan data, kemudian reduksi data, lalu penyajian data dan terakhir yaitu kesimpulan (Penarikan/verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sumberjo kecamatan Widang kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang memiliki hutan seluas 590 hektar. Wilayah hutan tersebut cukup luas sehingga memiliki banyak manfaat untuk warga sekitar salah satunya dimanfaatkan untuk bercocok tanam, hal itu menyebabkan sebagian besar warga desa Sumberjo bermata pencaharian bertani dan berkebun. Pemanfaatan hutan secara berlebihan tanpa diimbangi dengan pelestarian dapat menimbulkan masalah alam. maka dari itu perlunya kesadaran dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam, khususnya hutan agar tidak terjadi bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia dan ekosistem lingkungan dapat terjaga, sehingga sumber alamnya dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tanpa merusaknya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hutan nampak terjadi di desa Sumberjo, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masalah-masalah alam yang ditemukan di desa Sumberjo, diantaranya banjir hutan, kekeringan dan perburuan liar. sebagaimana dikemukakan oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“...masyarakat desa Sumberjo belum bisa dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi mbak, karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan, eksploitasi penggunaan air, penebangan pohon dll sehingga mengakibatkan banjir dan kekeringan ...”(wawancara, 15 Februari 2021)

Hal tersebut diperkuat dari hasil observasi pada tanggal 11 Juni 2020 bahwa disana terjadi kekeringan berkepanjangan. Kekeringan menjadi masalah paling serius yang dihadapi warga desa Sumberjo, kekeringan yang terjadi dengan rentan waktu yang cukup lama yang membuat warga sekitar resah. Dari hasil wawancara pada tanggal 01 April 2021 kepala desa Sumberjo mengatakan bahwa kekeringan terjadi mulai bulan Mei hingga November. Air notabennya sebagai hal yang mendasari kehidupan manusia tanpa adanya air manusia tidak bisa mandi, minum, mencuci dll, dari itu manfaat air cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia. Kekeringan berkepanjangan tersebut disebabkan karena tidak ada hujan dalam rentan waktu yang cukup lama, banyaknya pengeboran secara besar-besaran di area persawahan dan berkurangnya pohon-pohon di area hutan lindung. Pengeboran secara besar-besaran yang dilakukan oleh warga yang memiliki sawah untuk mengairi sawah karena tidak terjadi hujan dengan rentan waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan tanah persawahan kering dan gagal panen. Selain itu, saluran irigasi sawah yang juga ikut kering menyebabkan warga melakukan perairan dengan menggunakan bor besar di area persawahan setiap hari.

Banjir hutan juga merupakan salah satu bencana yang terjadi setiap tahun di desa Sumberjo, sebagaimana hasil observasi pada 21 maret 2021 dan 3 januari 2021 desa Sumberjo mengalami banjir. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Anto,

“...musim hujan yang menimbulkan banjir terjadi pada bulan November sampai Maret, tapi yang benar-benar banjir sekitar Desember akhir sampai Januari ...”(wawancara, 01 April 2021)

Banjir hutan menimpa warga di beberapa titik khususnya daerah dekat saluran air dan daerah dataran rendah. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan baik hutan maupun lingkungan sekitar. Kebiasaan masyarakat yang belum menunjukkan perilaku *ecological citizenship* ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat terhadap lingkungan yang masih menebang pohon, mencuri kayu, kurangnya kesadaran dalam menjaga saluran air dan penampungan air (waduk), pasif terhadap program yang dibuat desa, dan kebiasaan masyarakatnya dalam membuang sampah sembarangan.

Permasalahan selanjutnya yaitu perburuan liar yang masih terjadi hingga saat ini. Perburuan liar pada hewan

mengakibatkan hilangnya populasi hewan di hutan sehingga terjadi tidak seimbang ekosistem hutan. Perburuan liar dilakukan oleh orang yang berada di daerah desa hutan ataupun luar daerah desa dengan sebagian besar memburu kijang, babi hutan, burung dan ular. Beberapa tahun lalu hutan di daerah Sumberjo terdapat bermacam-macam hewan didalamnya namun seiring berjalannya waktu akibat perburuan liar yang didominasi orang dari luar desa mengakibatkan hilangnya hewan-hewan yang ada di hutan. Masalah-masalah alam tersebut dapat dikatakan kelestarian alam yang ada di desa Sumberjo belum terjadi, dengan masalah-masalah yang ada ketika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kehidupan yang akan datang. Adapun masalah alam yang terjadi di desa Sumberjo disebabkan beberapa factor seperti penebangan pohon akibat pembukaan lahan dan pencurian kayu, pengeboran sumur, membuang sampah sembarangan, dan kurangnya gotong royong warga. Penebangan pohon secara liar merupakan pokok dari permasalahan alam yang ada di desa Sumberjo, penebangan pohon secara liar dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab yang ada di lingkungan eksternal ataupun internal desa. Adapun penebang pohon sekala kecil biasanya dilakukan oleh warga desa Sumberjo sendiri dan bisa juga dari luar desa Sumberjo, warga yang menebang pohon untuk mencuri kayu tersebut dilakukan di malam hari dengan alasan ketika malam hari mandor penjaga hutan akan mengalami kesulitan dalam menemukan mereka para pencuri kayu ketika ketahuan. Penebangan pohon tersebut dilakukan oleh masyarakat untuk mencari kayu guna dijual ke pengebul yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membuat mebel.

Penebang pohon sekala menengah keatas yang dilakukan oleh Perhutani bersama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) desa Sumberjo. System tebang pilih dan system tebang tanam yang dilakukan oleh Perhutani juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Pasalnya pohon yang ditebang oleh perhutani dan digantikan oleh pohon yang baru akan tumbuh besar dengan jangka waktu puluhan tahun, dari jangka waktu tersebut pohon-pohon kecil yang digantikan tersebut tidak dapat menyerap air dengan baik, sehingga terjadilah banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim kemarau. Dalam penebangan pohon yang digunakan untuk membuka lahan pertanian di wilayah hutan tersebut dilakukan oleh warga dengan persetujuan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang bekerjasama dengan Perhutani yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat desa. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh kepala desa Sumberjo,

“...masalah-masalah alam di desa ini sebenarnya

disebabkan oleh rusaknya hutan lindung mbak, penebangan pohon di sekitar hutan baik dilakukan oleh masyarakat yang mencuri kayu atau penebangan untuk membuka lahan pertanian..” (wawancara, 18 Februari 2021)

Hal tersebut juga dipertegas oleh seorang warga bernama Anto.

“...kalau banjir di desa Sumberjo ini disebabkan oleh penebangan pohon secara liar yang akan digunakan untuk pembukaan lahan pertanian...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Hal tersebut perlunya ketegasan dari pihak Perum Perhutani ataupun LMDH untuk mengurangi pembukaan lahan hutan serta pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas pada warga pencuri kayu. Karena penebangan kayu yang dilakukan terus menerus dapat merusak hutan lindung sehingga tidak ada pohon yang dapat meresap air yang selanjutnya dapat menyebabkan banjir hutan dan kekeringan di pemukiman warga.

Pengeboran sumur di area persawahan juga menjadi salah satu penyebab permasalahan alam yang terjadi di desa Sumberjo. Pengairan sawah dengan menggunakan bor besar salah satu penyebab terjadinya kekeringan, hal tersebut disebabkan karena sumber air di desa menggunakan bor kecil sehingga sumber air yang di desa kalah dengan yang ada di sawah, sehingga air yang ada di desa tidak lagi keluar. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“...kekeringan disebabkan luas daerah hijau yang berkurang, masyarakat yang terlalu mengeksploitir penggunaan air dan didukung oleh tidak adanya perawatan sumber air...”(wawancara, 15 Februari 2021)

Hal tersebut juga dipertegas oleh kepala desa Sumberjo,

“...kekeringan di desa ini disebabkan karena banyaknya pengeboran sumur di daerah persawahan untuk pengairan sawah bukan air minum warga...”(wawancara, 18 Februari 2021)

Permasalahan ini pihak desa membuat kebijakan baru untuk menanggulangi kekeringan yang mengakibatkan warga kekurangan air bersih yaitu dengan cara membuat saluran air bersih melalui pipa kepada warga yang terdampak. Namun solusi tersebut dinilai kurang efektif karena tidak berupa pencegahan atau tidak mempunyai efek jangka panjang. Sarifah sebagai warga yang terdampak mengatakan,

“...Pemerintah desa sebenarnya sudah mengupayakan kebijakan setiap terjadi kekeringan akan tetapi solusi atau kebijakan yang diberikan rang dianggap solutif menurut saya, sebab saya ambil satu contoh kasus kekeringan yang sering terjadi di musim kemarau. kita ketahui bahwa permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang baru lagi bahkan sudah

bertahun-tahun dan berulang kali terjadi namun pemerintah desa tidak memberikan tindakan yang pas dan paten untuk menangani masalah tersebut, pemerintah kerap keteteran dan menunggu keluhan warga tiap kekeringan melanda. seharusnya kan hal tersebut tidak terjadi ya wong ini masalah tiap tahun terjadi kok masih gitu gitu saja...” (wawancara, 19 Februari 2021)

Penyebab kelestarian alam tidak berjalan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah sembarangan masih sering terjadi di desa Sumberjo terlebih membuang sampah ke sungai. Kebiasaan warga tersebut didasarkan karena tidak ada tempat untuk membuang sampah dirumahnya, namun tidak disadari bahwa kebiasaan tersebut dapat menimbulkan banjir yang dapat menyimpannya setiap tahun. Kebiasaan warga dalam membuang sampah sembarangan tersebut terdapat di daerah aliran air dan daerah lahan kosong seperti lapangan desa dan pinggiran hutan. Sampah tersebut berupa sampah rumah tangga, namun lebih dominan sampah pampers bayi. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari warga setempat bernama Sarifah,

“...kesadaran masyarakat kurang sekali mbak, sebab masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan tanpa memikirkan dampak kelestarian yang akan terjadi seperti sering membuang pampers di aliran air...” (wawancara, 19 Februari 2021)

Hal tersebut dipertegas oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“... masyarakat sering membuang sampah tidak pada tempatnya mbak seperti disungai, didaerah barat desa juga banyak di sekitar pohon-pohon jati itu. Orang-orangnya pada malas cari enaknya saja...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Akibat dari kebiasaan warga membuang sampah di saluran air maka saluran air ketika hujan akan tersumbat. sehingga air tidak dapat mengalir dengan semestinya ketempat muara yang berdampak, air meluber ke rumah warga dan terjadilah banjir. Selain diperlukan kesadaran warga dalam membuang sampah pada tempatnya diperlukan peran pemerintah desa dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mempertegas dan memaksa sehingga menimbulkan efek jera kepada warga yang membuang sampah sembarangan. Namun dari hasil wawancara dengan warga sekitar tempat pembuangan sampah Widiatin mengatakan kesadaran warga sekitar sudah cukup baik karena tempat yang biasanya digunakan untuk membuang sampah oleh warga sekarang sudah bersih,

“...Saya rasa sudah cukup baik mbak. Melihat dari beberapa tempat yang biasanya banyak sekali sampah sudah lebih bersih dan tidak ditempati sebagai pembuangan lagi. Seperti di sekitar lapangan makam ndowo sekarang sudah bersih

tidak ada orang yang membuang sampah disitu lagi...” (wawancara, 19 Februari 2021)

Penyebab tidak berjalannya *ecological citizenship* di desa Sumberjo yaitu akibat dari kurangnya gotong royong warga dalam menjaga lingkungan sekitar. Salah satu kurangnya gotong royong warga yaitu dalam menjaga saluran air dan tempat pembuangan air akhir. tersumbatnya saluran air, di desa Sumberjo terdapat saluran air atau selokan yang berfungsi untuk menyalurkan air buangan ketempat penampungan air terakhir. Tempat saluran air tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang disebabkan karena tidak terawat, banyak warga yang tidak sadar akan fungsi saluran air tersebut. Ketika musim hujan dan banjir datang, saluran tersebut akan berfungsi menampung dan mengalirkan air hujan dan banjir menuju ketempat penampungan air terakhir. Kurangnya kesadaran warga untuk melakukan gotong royong dalam membersihkan dan merawat saluran air menyebabkan saluran air tersumbat oleh tanah dan tumbuhan liar, pernyataan tersebut diungkapkan oleh kepala desa,

“... apa mbak masyarakat ini kurang gotong royong, seharusnya mereka itu membersihkan saluran air agar tidak tersumbat. Mereka terlalu focus kepekerjaan mereka disawah sehingga saluran air itu penuh dengan tanah dan tumbuhan liar...” (wawancara, 18 Februari 2021)

Hal yang sama diungkapkan oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“...banjir ini disebabkan karena tidak ada jalur air yang memadai, jalur air yang ada didesa cuma selokan toh itu juga tersumbat oleh tanah dan tumbuhan liar...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Selain saluran air yang tidak terawat, tempat penampungan akhir semakin dangkal juga menyebabkan banjir di desa Sumberjo. tempat penampungan akhir air setiap tahunnya semakin dangkal dan menyempit akibat tidak terawat. Desa Sumberjo memiliki belasan sungai yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan menampung air dari beberapa tempat, namun karena kurang terawatnya tempat tersebut sehingga mengalami penyempitan bahkan ada beberapa yang rata dengan tanah yang berdampak pada tidak dapat menampung air secara maksimal yang selanjutnya menyebabkan banjir. Hal tersebut ditegaskan oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“...selain jalur air yang tidak memadai ya karena tempat akhir air atau waduk tersebut dangkal mbak mengalami penyempitan karena tidak terawat...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya sikap gotong royong warga dalam menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan desa yang berdampak pada dirinya sendiri. Perburuan liar yang terus dilakukan oleh warga juga merupakan bentuk

dari *ecological citizenship* belum berjalan, pasalnya warga belum mengerti tentang pentingnya kelestarian alam sekitar. Hal tersebut dipertegas oleh seorang warga bernama Anto,

“...salah satu permasalahan yang ada di desa yang disebabkan oleh ulah manusia yaitu perburuan terhadap binatang, dulu di desa ini banyak sekali binatang tapi sekarang tidak ada sama sekali karena banyak yang diburu seperti burung, babi hutan, kijang. Itu semua diakibatkan kerakusan manusia monyet juga tidak ada itu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam mbak..” (wawancara, 15 Februari 2021)

Manusia memiliki sifat yang tak pernah puas, tidak hanya tumbuhan yang dieksploitasi namun juga hewan. dari hasil penelitian ini masih banyak warga yang mengatakan bahwa masyarakat desa Sumberjo belum memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap lingkungan banyaknya permasalahan alam yang disebabkan oleh manusia menjadi bukti belum tercapainya *ecological citizenship* di desa sumberjo. Hal tersebut dipertegas oleh Aditya,

“...Kesadaran masyarakat masih kurang mbak, hal ini dibuktikan masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, seperti di pinggir jalan, di sungai dan tempat lainnya...” (wawancara, 20 Februari 2021)

Meskipun banyak warga yang kurang sadar terhadap lingkungan sekitar, namun masih ada warga yang peduli terhadap lingkungan seperti pemuda bernama Mulsulianto, pemuda ini melakukan penghijauan dengan menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar lapangan desa yang sebelumnya digunakan untuk pembuangan sampah oleh warga desa, selain itu Mulsulianto juga menggerakkan anak-anak yang ada di taman belajar “sanggar gubuk sinau” yang ada di desa Sumberjo untuk belajar menanam sayur-sayuran dan buah-buahan seperti sawi, bayam, stoberi, anggur dll. pernyataan tersebut dipaparkan oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“...ada mbak warga yang masih peduli terhadap lingkungan, dia menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar lapangan makam ndowo, selai itu juga dia mengajak anak-anak sanggar untuk menanam sayuran dan buah-buahan seperti yang mbak lihat...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Kesadaran terkait pentingnya menjaga kelestarian alam juga dirasakan oleh seorang warga bernama Sarifah,

“...Saya berupaya untuk tidak membuang sampah di tempat aliran sungai seperti golongan samping rumah kak sudin itu (aliran sungai di Sumberjo) supaya ketika musim hujan tiba seperti saat ini airnya bisa mengalir lancar dan tidak meluber ke jalan-jalan yang mengakibatkan bajir sampai di

depan rumah saya...” (wawancara, 19 Februari 2021)

Selain dibutuhkan kesadaran dari warga desa juga perlunya upaya-upaya dari pemerintah baik pusat ataupun desa untuk menyadarkan masyarakat desa agar menjadi warganegara yang baik, warganegara yang sadar terhadap kondisi lingkungan alam atau disebut dengan kewarganegaraan *ecological citizenship* yang akan berdampak pada masa depan.

Upaya-upaya yang diberikan Perhutani dan pemerintah desa dalam pelestarian lingkungan berbasis *ecological citizenship*

Bantuan bibit pohon

Bantuan bibit pohon salah satu cara Perum Perhutani menjaga dan melestarikan lingkungan hutan dengan tujuan agar pohon-pohon di hutan tidak habis setelah ditebang. Perum Perhutani memberikan bantuan bibit pohon jati siap tanam sebanyak 700 biji setiap tahunnya. Pohon-pohon tersebut berfungsi untuk reboisasi lahan yang telah digunakan untuk pertanian sehingga hutan tidak gundul. hal tersebut disampaikan oleh ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Asri desa Sumberjo Imam Sugondo,

“...upaya yang diberikan perhutani yaitu memberikan sumbangan kepada hutan berupa bibit pohon jati sebanyak 7000 pohon setiap tahunnya, dan itu sudah ditanam untuk masih hidup atau tidak itu sudah urusan yang menanam mbak...” (wawancara, 10 Oktober 2020)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh kepala desa,

“...selama ini upaya yang sudah diberikan oleh perhutani yaitu bantuan bibit tanaman dan penanaman kembali setelah ditebang...” (wawancara, 18 Februari 2021)

Bibit-bibit pohon tersebut selanjutnya akan ditanam bersama masyarakat di hutan yang pohonnya telah ditebang guna pembukaan lahan untuk aktivitas perkebunan dan pertanian. Dari hasil wawancara tersebut upaya yang diberikan oleh Perum Perhutani sudah cukup baik bagi kelestarian alam, hanya saja dalam upaya ini, Perum Perhutani dan pemerintahan desa setelah memberi bantuan bibit pohon kepada masyarakat langsung lepas tangan tanpa adanya pengontrolan terhadap penanaman pohon jati tersebut. Sehingga tidak mengetahui apakah pohon tersebut benar-benar hidup atau mati. Tidak ada pengontrolan hasil tanam dari pihak pemerintah desa ataupun Perum Perhutani membuktikan kurangnya kesadaran dan partisipasi dari pihak pusat yang juga dapat mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat. Dari hal tersebut dapat dikatakan tidak terjadi kesesuaian antara rancangan lingkungan yang diberikan oleh Perum Perhutani dengan perilaku yang dilakukan, sehingga program yang diberikan belum

berjalan dengan baik. Karena program yang diberikan belum berjalan maka pemerintah desa dan perum perhutani dalam membangun kewarganegaraan *ecological citizenship* belum tercapai.

Sistem tebang tanam

Selain bantuan bibit pohon, upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan bekerjasama dengan LMDH yaitu sistem tebang pilih daerah hutan lindung dan sistem tebang tanam daerah pembukaan lahan perkebunan. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh ketua LMDH Wono Asri,

“...upaya yang diberikan Perum Perhutani dan LMDH yaitu dalam system pembukaan lahan dibarengi dengan penghijauan, biasanya ketika menanam pohon jati yang diberikan Perum Perhutani tersebut barengan dengan penanaman jagung, kacang ataupun lainnya oleh warga...” (wawancara, 10 Oktober 2020)

Sistem tebang tanam merupakan upaya penghijauan yang dilakukan oleh LMDH Wono Asri bersama Perum Perhutani untuk menggantikan pohon yang telah ditebang untuk area perkebunan dan pertanian. Dalam hal ini LMDH bekerjasama dengan Perum Perhutani untuk menyediakan lahan garapan seluas 30% dari luas hutan desa Sumberjo. Pembukaan lahan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan warga desa khususnya warga yang tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam. Lahan tersebut ditanamai jagung, kacang ataupun sayur-sayuran dengan 25% dari hasil panen diberikan pada kas LMDH Wono Asri dengan masa kontrak 5 tahun namun bisa diperpanjang lagi ke LMDH. Tidak ada syarat apapun bagi warga yang ingin membuka lahan garapan, siapapun bisa hanya saja dalam pendaftaran wajib mengikuti sosialisasi yang diberikan LMDH bersama Perum Perhutani sebelum membuka lahan dengan mematuhi peraturan, mendaftar sebagai anggota LMDH, mengikuti sosialisasi dua kali dalam setahun dan menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut berisi: 1) kami bersedia menanam tanaman dengan swadaya pada petak 9 P luas 7,8 Ha 2) kami bersedia mengadakan / membeli bibit jati sendiri sampai dengan penanaman 3) kami tidak akan menebang tegakan jati yang sudah ada pada petak tersebut 4) kami bersedia ikut membantu mengamankan tanaman kehutanan supaya tumbuh baik sampai daur 5) kami tidak akan membibrik lahan tutupan di dalam kawasan hutan 6) kami tidak akan membakar serapah / limbah panen didalam area tanaman 7) kami tidak akan merempes daun dan merempel cabang kecuali dikawal petugas 8) kami siap meninggalkan lahan garapan sewaktu-waktu tanpa syarat apapun apabila lahan ditutup oleh Perum Perhutani. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh ketua LMDH Wono Asri,

“...di LMDH itu kalau mau membuka lahan daftar dulu mbak, nanti dikasih surat perjanjian yang ditanda tangani mandor POLTER, mandor tanam, saksi-saksi mandor POLTER, KRPH Sigagak dan saya ketua LMDH, selain itu juga mendapat buku hak dan kewajiban pada waktu kumpul. Jadi sebelum pembukaan lahan itu dikumpulkan beberapa kali terlebih dahulu untuk mendapatkan pengarahan...” (wawancara, 10 Oktober 2020)

Adanya surat perjanjian diharapkan warga dapat mematuhi dari isi perjanjian tersebut sehingga hutan tetap terjaga kelestariannya. Dari apa yang telah diupayakan oleh pihak pemerintah desa dan Perum Perhutani dalam menjaga kelestarian lingkungan alam hutan yang melibatkan masyarakat guna tercapainya kewarganegaraan *ecological citizenship* di desa Sumberjo, pasti terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Selain surat pernyataan atau perjanjian, Perum Perhutani juga memberi buku hak dan kewajiban Perum Perhutani dan KTH (Kelompok Tani Hutan). Tujuan dari hal tersebut agar dalam proses pembukaan lahan warga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh LMDH bersama Perum Perhutani sesuai dengan prosedur kelestarian alam hutan, dengan tidak menebang pohon diluar tanah garapan khususnya hutan lindung, tetap menjaga tanah garapan agar tidak menggunakan bahan kimia, tidak membakar serapah diarea hutan dan yang paling penting merawat tanaman pohon jati yang telah diberikan oleh Perum Perhutani dengan baik agar dalam penutupan lahan pohon yang sebelumnya ditebang dapat tergantikan dengan yang baru agar tidak terjadi hutan gundul. Dalam proses perawatan pohon jati seharusnya harus diawasi oleh Perum Perhutani namun pada kenyataannya tidak, setelah ditanam oleh pengarang pohon tersebut dibiarkan tidak ada yang mengontrol. Pohon jati tersebut sewaktu-waktu dapat mati apalgi musim kemarau susah untuk mendapatkan air. Dari hasil wawancara dengan ketua LMDH Wono Asri pohon jati yang diberikan oleh Perhutani ketika musim kemarau bisa mati 100%. Ketika program yang diberikan Perum Perhutani sudah cukup baik namun dalam pelaksanaannya warga tidak merawatnya dan dari pihak Perhutani ataupun LMDH juga tidak mengawasi dalam pelaksanaan program, sehingga program tersebut tidak berjalan lancar dengan dibuktikan banyaknya pohon yang mati terutama pada musim kemarau.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan oleh LMDH Wono Asri dan Perum Perhutani dalam melestarikan lingkungan khususnya hutan tidak berjalan, hal tersebut disebabkan tidak terjadi kesesuaian antara rancangan program yang Kelestarian Lingkungan Hutan Berbasis *Ecological*

Citizenship diberikan oleh LMDH dalam program system tebang tanam dengan pola perilaku penggarap maupun LMDH dan Perum Perhutani dalam pengaplikasian program sehingga program yang diberikan belum berjalan dengan baik. Karena tidak terjadi kesesuaian antara program dan perilaku yang diakomodasikan dalam lingkungan tersebut sehingga *ecological citizenship* belum tercapai dalam program system tebang tanam.

Penanaman pohon di tepi jalan

Penanaman pohon bersama masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama Perum Perhutani untuk mewujudkan warga negara yang sadar terhadap lingkungan atau bisa disebut juga *ecological citizenship*. dalam upaya ini pemerintah desa menanam pohon sepanjang jalan masuk ke desa agar terlihat hijau dan asri, selain itu akar pohon yang memiliki fungsi menyerap air sehingga pohon ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Sumberjo seperti mencegah terjadinya banjir dan kekeringan. Penanaman pohon di pinggir jalan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat merupakan upaya yang sangat bagus bagi kelestarian alam, apalagi dalam penanamannya melibatkan masyarakat. tujuan tersebut guna mensosialisasikan agar masyarakat ikut serta dalam menjaga lingkungan, dengan cara gotong royong sehingga masyarakat paham akan pentingnya penghijauan dan pelestarian alam sehingga kewarganegaraan *ecological citizenship* dapat tercapai. selain itu hasil penanaman pohon yang dilakukan oleh warga bersama pemerintah desa dapat menambah jumlah resapan air guna mengurangi dampak banjir. Pernyataan tersebut dipaparkan oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“...setau saya ada program penghijauan dari desa menanam pohon di pinggir jalan itu mbak, sepanjang jalan masuk desa dan itu melibatkan masyarakat dalam penanamannya, tapi ya gitu banyak yang mati karena tidak terawat setelah penanamannya ...”(wawancara, 15 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah penanaman pohon tidak ada masyarakat ataupun pemerintah desa yang merawatnya sehingga banyak pohon yang mati. Dari upaya yang diberikan oleh pemerintah desa ini sudah cukup baik dalam mewujudkan *ecological citizenship* dikarenakan dalam penanaman pohon melibatkan masyarakat, hanya saja setelah penanamannya tidak dilakukan perawatan yang mengakibatkan pohon mati. Sehingga upaya yang diberikan oleh pemerintah desa dapat dikatakan belum baik, seharusnya pemerintah desa ataupun warga melakukan perawatan setelah penanaman sehingga

pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dengan baik. karena dalam pengaplikasian program tersebut kurang ada pengawasan dan perawatan yang mengakibatkan pohon mati, maka dapat dikatakan program yang diberikan oleh pemerintah desa belum bisa dikatakan berhasil dalam menciptakan kewarganegaraan ekologi.

Bersih-bersih lingkungan

Bersih-bersih lingkungan desa yang dilakukan oleh anggota PKK, bersih-bersih tersebut dilaksanakan setiap hari minggu pagi dengan system bergilir. Maksud dari system gilir yaitu dimana dalam pengerjaannya dilakukan bergantian dari wilayah desa Sumberjo paling barat yaitu dusun Segagak, dan minggu selanjutnya bergeser mengarah ke timur menuju dusun Tengah dan selanjutnya dusun Minggu. Terkait sasaran dari apa yang dibersihkan yaitu selokan, sampah yang ada di sepanjang jalan dan tumbuh-tumbuhan liar. Organisasi kemasyarakatan ini tidak membatasi terkait siapa saja yang bisa membersihkan namun, siapa saja bisa mengikuti bersih- bersih lingkungan. kegiatan bersih-bersih ini baru berjalan tiga bulan, karena pada saat ini terjadi pandemi Covid-19 kegiatan diberhentikan sementara waktu untuk menghindari kerumunan dan kegiatan akan dilanjutkan ketika pandemi Covid-19 berakhir. pernyataan tersebut dipaparkan oleh kepala desa,

“...ada bersih-bersih desa mbak, itu yang melaksanakan ibu-ibu PKK setiap hari minggu. Baru berjalan beberapa bulan tapi karena sekarang musim COVID ya gak berjalan lagi kan itu membuat kerumunan takutnya nanti ada teguran. Ya mending berhenti dulu sementara waktu...”(wawancara, 18 Februari 2021)

Tujuan adanya bersih-bersih lingkungan yaitu untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk hidup bersih, menjaga lingkungan sekitar, membuang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap alam khususnya lingkungan tempat tinggal. Karena tingkat kesadaran masyarakat sendiri masih kurang, bisa dilihat dari membuang sampah sembarangan, eksploitasi terhadap air dan lainnya. Sehingga diperlukan penggerak untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar mereka paham pentingnya menjaga lingkungan, selain itu diperlukannya peraturan yang tegas dan mengikat untuk memberi efek jera kepada masyarakat agar terciptanya kewarganegaraan *ecological citizenship*. Dalam program bersih-bersih yang dipelopori oleh anggota PKK tersebut telah berjalan dengan baik, terjadi kesesuaian antara rancangan program dengan pola perilaku dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan tersebut. Sehingga program ini dikatakan berhasil dalam menggerakkan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar sehingga diharapkan program ini dapat

mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan atau yang disebut dengan *ecological citizenship*.

Sosialisasi kebersihan lingkungan

Selain bersih-bersih desa, upaya yang diberikan desa dalam mewujudkan masyarakat yang peduli lingkungan atau yang biasa disebut dengan *ecological citizenship* yaitu Sosialisasi kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan ini dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa dilakukan setiap menjelang musim penghujan dan dilakukan tingkat RT. Sosialisasi kebersihan lingkungan menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan seluruh masyarakat desa untuk gotong royong membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas desa yang rusak. Program ini dipelopori oleh kepala desa Sumberjo bersama perangkat desa dengan tujuan agar masyarakat aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Kegiatan bersih-bersih desa ini dilakukan sebelum musim penghujan, alasan tersebut karena selokan yang ada di desa Sumberjo ketika musim kemarau tidak berfungsi dan tidak terawat, selokan dipenuhi dengan tanaman liar, sampah dan tanah. Agar air hujan atau air kiriman dari hutan ketika musim penghujan dapat mengalir lancar ke tempat pembuangan air akhir, sehingga air tidak meluap kerumah warga. Sosialisasi ini dilaksanakan tingkat RT dan diawasi oleh kepala desa sehingga warga harus berpartisipasi dalam kegiatan ini, dalam proses sosialisasi warga dikumpulkan berdasarkan tingkat RT. Waktu sosialisasi dilaksanakan pada malam hari di rumah ketua RT, ketika ada warga yang tidak ikut membersihkan lingkungan maka akan mendapatkan hukuman adat dari desa yang berupa membayar satu bungkus rokok, dan hasil dari kumpulan rokok tersebut diberikan kepada warga yang ikut serta bersih-bersih lingkungan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh kepala desa,

“...upaya selanjutnya sosialisasi kebersihan lingkungan, biasanya saya beserta perangkat pergi ke RT, jadi setiap RT saya datang untuk melakukan sosialisasi kebersihan lingkungan dan untuk warga yang tidak mengikuti kegiatan itu diberi sanksi adat berupa membelikan satu bungkus rokok...” (wawancara, 18 Februari 2021)

Namun pada kenyataannya masih banyak warga yang tidak ikut kegiatan tersebut karena banyak yang sibuk bekerja dan mengurus sawah. Program sosialisasi dan kegiatan kebersihan lingkungan tersebut belum berjalan karena dari rancangan program yang diberikan kepala desa dengan pengaplikasiannya terhadap pola perilaku warga belum sesuai, dapat dilihat pada banyaknya warga yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi maupun bersih-

bersih. Kurangnya partisipasi masyarakat serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh kepala desa sehingga tidak memberi efek jera kepada warga. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa program tersebut belum berhasil dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar atau dapat dikatakan *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum berjalan.

Pembuatan *Green House*

Green house merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk membudidayakan tanaman, *green house* sering dijumpai diberbagai instansi pemerintahan ataupun instansi pendidikan untuk melakukan penghijauan. Anggota PKK desa Sumberjo juga membuat *green house* untuk melakukan penghijauan disekitar balai desa. Hal tersebut dilakukan karena bentuk kepedulian terhadap lingkungan agar tetap hijau dan asri. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota BPD desa Sumberjo Nurul Priyanto,

“...ada upaya yang cukup bagus mbak dari desa, yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK yaitu pembuatan *green house* tapi saya juga gak tau itu masih berjalan atau tidak saya tau itu di balai desa...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh kepala desa Sumberjo,

“...pembuatan *green house* oleh ibu PKK itu masih berjalan sampai sekarang mbak, sekarang ditempatkan dirumah pak carik agar mendapat perawatan setiap hari kalau dibalai desa kan nanti takutnya mati tidak ada yang merawat. *Green house* itu isinya tanaman sayur mayur, bunga, obat-obatan juga ada mbak...” (wawancara, 18 Februari 2021)

Hasil wawancara di atas terdapat beberapa jenis tanaman yang ada di *green house* desa Sumberjo seperti sayur-sayuran, obat-obatan, buah-buahan dan tanaman hias. Tanaman tersebut dikelola oleh salah satu anggota PKK dirumahnya, hal tersebut dilakukan guna mempermudah dalam proses perawatannya karena ketika diletakkan di balai desa tidak ada yang merawat sehingga tanaman akan mati.



Gambar 1. Pembuatan *Green House* (2021)

Program *green house* ini berjalan hingga saat ini dan akan diperbesar oleh mahasiswa yang melakukan praktek KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa Sumberjo. Dari program ini diharapkan tidak hanya anggota PKK

saja yang melakukan penghijauan, namun warga juga ikut berpartisipasi serta diharapkan anggota PKK memberikan sosialisasi ataupun gerakan kepada warga agar menanam tanaman disetiap rumahnya guna menjaga lingkungan agar tetap asri. adanya pola-pola perilaku yang telah tersusun atau disebut dengan 'program' yang dilakukan oleh anggota PKK dan program tersebut berjalan dengan apa yang telah dirancang sampai saat ini sehingga dapat dikatakan program tersebut berhasil dalam menerpakan kelestarian lingkungan. Selain upaya-upaya terkait tindakan yang diberikan oleh pemerintahan desa maupun perhutani, peraturan atau sanksi yang tegas sangat dibutuhkan guna memberi efek jera kepada individu atau kelompok yang melanggarnya, seperti kebijakan Perdes tentang pembuatan sumur.

Perdes (Peraturan Desa)

Peraturan Desa yang berisi tentang pembuatan sumur bor untuk area sawah dan waktu pengoperasian. Kebijakan ini dibuat oleh kepala desa Sumberjo beserta perangkatnya dengan tujuan agar dalam pembuatan sumur tidak melebihi dari apa yang tidak seharusnya sehingga tidak merugikan warga sekitar, karena semakin besar sumur yang dibuat akan berdampak pada kekeringan warga sekitar. kekeringan disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan di area persawahan dengan intensitas tinggi, namun pengeboran di sawah dilakukan karena terjadi musim kemarau yang mengakibatkan gagal panen akibat dari kekurangan air. Sedangkan waduk atau saluran irigasi juga tidak terdapat air sehingga pemilik sawah membuat sumur bor besar untuk melakukan pengairan. Pengeboran di area sawah yang cukup besar dan penggunaannya yang cukup lama membuat sumber mata air yang ada di pemukiman warga kalah dengan yang berada di area sawah sehingga sumur-sumur warga desa tidak lagi bersumber airnya. Terjadinya kelangkaan air bersih di area pemukiman warga sehingga dibuatnya peraturan desa untuk mengurangi dampak kekeringan, adapun isi dari peraturan desa tersebut yaitu : 1) Dinding pengeboran maksimal tiga dim. 2) kedalaman pengeboran di bawah 100 m. 3) waktu pengoperasiannya dilakukan serentak pada musim tanam. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh kepala desa,

“...di desa Sumberjo ini ada beberapa peraturan tapi kalau terkait dengan lingkungan ya perdes tentang pembuatan sumur bur di area persawahan itu, isinya tentang pembuatan sumur bur untuk area sawah dan waktu pengoperasiannya...”
(wawancara, 18 Februari 2021)

Peraturan Desa tersebut dinilai kurang efektif pasalnya selama peraturan tersebut ada dan telah diberlakukan namun pada kenyataannya kemarau dan kekurangan air masih terjadi sampai saat ini. Banyak

pemilik sawah yang melakukan pengeboran secara besar-besaran untuk mengairi sawahnya. Kurang tegasnya pemerintah desa dalam menangani dan memberi sanksi dalam permasalahan ini, agar pemilik sawah menaati peraturan yang dibuat oleh desa sehingga tidak mengakibatkan kekeringan yang terus menerus. Dalam hal ini tidak terjadi kesesuaian antara rancangan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah desa dengan perilaku yang diakomodasikan dalam lingkungan tersebut sehingga program tersebut dinilai gagal dan *ecological citizenship* tidak tercapta.

Edukasi penanaman pohon pada anak-anak

Edukasi menanam pohon pada anak merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberikan pendidikan sejak dini terkait menjaga dan melestarikan alam. Dengan pendidikan sejak dini anak-anak akan paham pentingnya menjaga alam sehingga akan mengimplementasikan bagaimana cara menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang telah dipelajari. Kebiasaan dari kecil yang positif akan membawa dampak positif juga bagi kehidupan yang akan datang. Edukasi penanaman pohon pada anak diselenggarakan di sebuah rumah baca yang ada di desa Sumberjo yang bernama 'Sanggar Gubuk Sinau' dengan dipelopori seorang pemuda bernama Mulsulianto. Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada 01 Januari 2021 di Sanggar Gubuk Sinau terdapat beberapa tanaman yang mulai tumbuh. Kegiatan tersebut dilakukan dari proses penanaman, perawatan hingga pemanenan, kegiatan edukasi tersebut dilakukan agar anak-anak bisa mengetahui proses menanam tumbuhan dengan baik dan benar serta guna melestarikan lingkungan alam. Tanaman yang ditanam berupa sayur-sayuran dan buah-buahan seperti sawi, bayam, kangkung, sroberi dan anggur. Tidak hanya proses penanaman namun ketika masa panen tiba anak-anak juga diajari untuk mengelola hasil tanaman tersebut.



Gambar 2. Hasil tanam sawi oleh anak-anak (2021)
Selain sebagai pelopor edukasi penanaman pohon pada anak, Mulsulianto juga salah satu pemuda yang

melakukan penanaman pohon disalah satu lapangan di desa Sumberjo, tempat tersebut sebelumnya dijadikan tempat membuang sampah oleh warga sekitar dan sekarang ditanami tumbuh-tumbuhan oleh Mulsulianto. Kesadaran akan pentingnya kelestarian pada warga membuat Mulsulianto tergerak untuk terus melakukan penghijauan dikarenakan banyaknya masalah alam yang terjadi di desa Sumberjo. Dari hal tersebut diharapkan Mulsulianto bersama anak-anak Sanggar Gubuk Sinau dapat menggerakkan warga Sumberjo dalam pelestarian lingkungan sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ada di desa Sumberjo selain itu agar lingkungan tetap hijau dan asri.

Pembuatan pompa air bersih

Masalah kekeringan yang melanda desa Sumberjo setiap tahunnya membuat warga desa kekurangan air bersih, sehingga kepala desa membuat upaya berupa memberikan pompa saluran air kepada seluruh warga yang membutuhkan selama kekeringan tersebut melanda. Pompa tersebut disalurkan pada bulan Juni hingga November musim kemarau kemarin, hal tersebut diungkapkan oleh kepala desa,

“...setiap musim kemarau tiba salah satu strategi agar warga tetap kecukupan air bersih itu kita (kepala desa bersama perangkat) membuat program pompa air bersih keseluruh warga yang terdampak, tahun kemaren bulan Juni sampai November...” (wawancara, 1 April 2021)

Hal tersebut dipertegas oleh Anto,

“...Kekeringan didesa ini terjadi mulai bulan Mei sampai November, sedangkan penyaluran pompa air bersih direalisasikan pada bulan Juni sampai sumur warga keluar airnya lagi, sekitar bulan November...” (wawancara, 1 April 2021)

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 23 Juli 2020 bahwa di desa Sumberjo terjadi kekeringan, dan di depan rumah warga terdapat pompa air dimana setiap warga yang mengambil air membayar RP. 10.000 per minggunya untuk mengganti uang listrik guna penyaluran air, dan pengambilan air diberi batas jam antara pukul 06:00-09:00 dan pukul 15:00-18:00 pembatasan tersebut dilakukan guna meminimalisir penggunaan air yang berlebihan oleh warga. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa ini cukup baik untuk masalah kekurangan air bersih yang dialami oleh warga namun untuk efek jangka panjang dinilai kurang begitu efektif, diperlukan upaya-upaya yang lebih untuk mengatasi permasalahan kekeringan untuk jangka panjang sehingga masalah ini tidak terjadi lagi.

Beberapa upaya telah ditempuh oleh pemerintah desa dan Perum Perhutani untuk menanggulangi masalah alam yang terjadi dan mewujudkan masyarakat yang

sadar terhadap lingkungan, namun kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menjadi hambatan kepala desa dalam melaksanakan program-program yang telah dibuat. Kepala desa mengungkapkan dari 2.760 jumlah penduduk desa Sumberjo 60% pendidikan SD, 20% SMP, 15% SMA dan 5% Sarjana, dari persentase pendidikan tersebut lulusan Sekolah Dasar yang mendominasi, sehingga kurangnya edukasi dari pihak sekolah tentang pelestarian alam menyebabkan pemahaman masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan kurang. Hal tersebut berdampak pada pola perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan, mengeksploitasi dalam penggunaan air, acuh terhadap permasalahan lingkungan dan tidak berpartisipasi dalam program-program yang telah diberikan pemerintah desa sehingga bencana alam terus terjadi.

Salah satu penyebab hambatan yang dihadapi oleh kepala desa yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam yaitu karena 60% pendidikan warga desa Sumberjo adalah Sekolah Dasar sehingga kurangnya pemahaman terhadap pelestarian lingkungan alam selain itu karena masyarakat terlalu fokus pada pekerjaan yang dilakukan sehari-hari di sawah sehingga tidak lagi memperdulikan terhadap masalah-masalah alam yang terjadi didesanya. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh kepala desa,

“...hambatan-hambatannya ya kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan mbak apalagi sebagian besar pendidikan masyarakat Sumberjo 60% dari pendidikan Sekolah Dasar jadi ya pemahaman tentang kelestarian alam kurang, yang mereka tau kerja kerja terus disawah...” (wawancara, 18 Februari 2021)

Selain karena pendidikan, hambatan yang dihadapi yaitu karena kurangnya dana. Hal tersebut disampaikan oleh Anto,

“...hambatannya karena masalah dana, karena tidak semua anggaran dana desa digunakan untuk kelestarian alam. Ada , tapi tidak banyak sehingga dananya kurang...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kelestarian alam harus didukung penuh oleh pemerintah desa, pemuda desa dan perhutani agar tercapainya warga negara yang sadar lingkungan atau disebut juga *ecological citizenship*. Ketika *ecological citizenship* sudah tercapai di desa Sumberjo maka hutan akan rimbun kembali, ekosistem hutan seimbang, tidak ada perburuan liar, masalah-masalah alam dan bencana alam tidak terjadi lagi sehingga masyarakat akan sejahtera. Harapan- harapan tersebut di ungkapkan oleh Anto,

“...harapan saya hutan rimbun kembali, sumber mata air melimpah, menjadi tempat wisata.

Karena sebenarnya ada potensi-potensi wisata yang belum ter-realisisikan. dari berbagai tempat di gunung ada beberapa lokasi yang sangat menarik...” (wawancara, 15 Februari 2021)

Harapan yang sama diungkapkan oleh Widiatin,

“...Berharap agar masyarakat dan pemerintah mampu bersinergi dalam upaya pelestarian lingkungan. Semoga saja bukan hanya berharap tapi juga turut aktif dalam pelaksanaan untuk mewujudkan...” (wawancara, 19 Februari 2021)

Harapan yang sama juga dilontarkan oleh Sarifah,

“...Harapan saya yok mari kita warga terutama dan pemerintahan kita jaga kelestarian lingkungan kita, kita cari solusi bareng bareng bagaimana baiknya menangani permasalahan kelestarian lingkungan yang kerap terjadi di desa kita ini supaya dapat sedikit demi sedikit teratasi dan hidup kita bahagia...” (wawancara, 19 Februari 2021)

Selain kesadaran dari masyarakat peran penting dari pemerintahan desa sangat mempengaruhi, perlunya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani permasalahan kelestarian lingkungan yang sering terjadi di desa sehingga dapat tercapainya *ecological citizenship* di desa Sumberjo. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kelestarian alam berbasis *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum berjalan. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak sejalan dengan teori Robert Barker dan Alan Wicker, dimana rancangan program berupa kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh pemerintah terkait kelestarian alam tidak sejalan dengan perilaku masyarakat dalam pelaksanaan program. Banyak masyarakat yang pasif dalam pelaksanaan program sehingga program-program yang diberikan tidak berjalan dengan baik. selain itu, tidak ada sanksi yang tegas dari pemerintah sehingga tidak memberi efek jera kepada para pelanggar yang mengakibatkan kelestarian lingkungan di desa Sumberjo belum berjalan.

Pembahasan

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang sering mengalami bencana alam seperti banjir, kekeringan dll. Bencana alam disebabkan karena adanya permasalahan alam yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat didukung dengan kurang tegasnya regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah desa maupun pusat sehingga masyarakat kurang aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Dari hasil wawancara pada 15 Februari 2021 Mulsuliyanto mengatakan bahwa kelestarian alam di hutan Sumberjo sekitar 10 tahun yang lalu masih terjaga kelestariannya, belasan sungai yang ada di Sumberjo masih berfungsi, sumber mata air di area

sawah, gunung dan pemungkiman warga masih terjaga dan populasi hewan yang ada di hutan juga masih terjaga dengan baik. namun berbanding terbalik dengan kondisi saat ini, kelestarian alam hutan tidak terjadi sehingga ekosistem alam rusak, terjadi bencana alam setiap tahunnya. hal ini juga diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2021 bahwa sumber mata air sungai yang masih ada tinggal dua dan hanya bisa digunakan ketika musim hujan.

Bencana alam yang sering dialami di desa Sumberjo diantaranya banjir hutan dan kekeringan. Banjir merupakan salah satu bencana alam tahunan yang selalu terjadi di desa Sumberjo, banjir ini berasal dari hutan yang mengalir turun ke permukiman warga yang disebabkan oleh hujan yang cukup deras di area hutan. Akibat pohon yang banyak ditebangi dan beralih fungsi menjadi perkebunan maka resapan air di area hutan berkurang, sehingga air tersebut mengalir turun ke permukiman warga sedangkan jalur air tidak memadai, tempat penampungan air atau waduk yang dangkal, serta banyaknya warga yang membuang sampah di aliran air mengakibatkan banjir semakin meluas. Selain karena curah hujan yang cukup deras, system tebang tanam dalam pembukaan lahan yang dilakukan oleh Perum Perhutani bersama LMDH untuk area perkebunan dan pertanian di area hutan, serta ditambah dengan kasus pcurian kayu di area hutan lindung oleh warga sekitar merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir hutan.

Kekeringan yang masih terjadi setiap musim kemarau, padahal desa Sumberjo merupakan daerah dengan sumber mata air yang begitu melimpah. menurut sejarahnya desa Sumberjo berasal dari bahasa jawa yaitu kata “Sumber” dan “Rejo”, Sumber berarti mata air dan rejo berarti berlimpah ketika digabungkan berarti sumber yang berlimpah, namun sekarang ini julukan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sumber mata air yang dulu melimpah sekarang rusak dan rata dengan tanah, dari belasan sungai yang ada di desa Sumberjo hanya terdapat dua sungai yang masih digunakan untuk mandi itupun digunakan ketika musim hujan karena ketika musim kemarau sungai tersebut tidak ada airnya. Tidak hanya sungai, sumur- sumur warga desa juga mengalami kekeringan, hampir semua warga desa mengalami hal tersebut. Beberapa warga setiap tahun mengebor sumur untuk memperdalam sumber airnya karena air yang ada di dalam sumur tidak lagi keluar. Namun beberapa warga tidak melakukan itu karena dengan mengebor sumur membutuhkan biaya yang cukup mahal, sedangkan tidak semua warga mampu mengebor sumur sehingga solusi yang dipakai warga yaitu menumpang warga yang sumurnya dibor untuk meminta airnya. Kekeringan berkepanjangan tersebut disebabkan karena tidak ada

hujan dalam rentan waktu yang cukup lama, banyaknya pengeboran secara besar-besaran di area persawahan dan berkurangnya pohon-pohon di area hutan lindung.

Faktor terjadinya bencana alam yang ada di desa Sumberjo yaitu akibat dari kurangnya kesadaran warganya dalam menjaga lingkungan alam serta eksploitasi terhadap penggunaan sumber daya alam dan kurang tegasnya regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintahan terkait dalam pengaplikasiannya. Sumberjo memiliki hutan yang cukup luas dari 590 hektar hutan di desa Sumberjo terdapat 30% hutan siap garap, hutan siap garap tersebut dimanfaatkan oleh Perum Perhutani dan LMDH untuk mensejahterakan warga desa. Dengan cara menyediakan tempat untuk bercocok tanam di area hutan dengan system pembukaan hutan setiap tahunnya 5 hektar berpindah-pindah dan dibarengi dengan penanaman pohon kembali. Dengan pembukaan lahan yang terus menerus dan berpindah-pindah dapat mengakibatkan hutan gundul sehingga bencana alamnya tidak hanya banjir saja namun kekeringan, longsor, dan berdampak pemanasan global. ketika warga dapat menjaga lingkungan dengan baik maka keseimbangan ekosistem khususnya hutan dapat terjaga, pohon-pohon di hutan dapat meresap air dengan baik sehingga air tidak mengalir kepermukiman warga dan tidak akan terjadi banjir maupun kekeringan setiap tahunnya.

Kurangnya gotong royong warga dalam menjaga lingkungan sekitar salah satu bentuk dari *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum berjalan. Kurangnya gotong royong dan peraturan yang tegas dari pemerintah desa mengakibatkan tersumbatnya saluran air dan penampungan air akhir semakin dangkal. Di desa Sumberjo terdapat saluran air atau selokan yang berfungsi untuk menyalurkan air buangan ketempat penampungan air terakhir, pada kenyataannya tempat saluran air tersebut beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah sementara oleh beberapa warga, setelah sampah tersebut sudah banyak baru warga membakarnya. Selain dijadikan tempat pembuangan sampah sementara saluran air tersebut tidak terawat sehingga rata dengan tanah, saluran dipenuhi dengan tanah ataupun tumbuhan liar karena tidak pernah dibersihkan oleh warga ataupun tidak adanya kegiatan kerja bakti oleh warga setempat sehingga saluran air tersebut tidak terawat. Selain karena warga desa yang notabennya bekerja sebagai petani sawah dan terlalu fokus pada pekerjaannya di sawah sehingga tidak sempat membersihkan saluran air tersebut. selain itu karena disebabkan kurangnya kesadaran warga desa dan tidak didukungnya peraturan yang tegas dan memaksa dari pemerintah membuat warga merasa tidak peduli dengan hal kecil yang akan menimbulkan bencana terhadap diri

mereka sendiri. Butuhnya dukungan dari pihak desa untuk mensosialisasikan kepada warga akan fungsi saluran air yang tepat guna mengurangi dampak banjir yang ada di desa Sumberjo, selain itu guna menyadarkan warga agar peduli terhadap lingkungan sekitar sehingga terciptanya kewarganegaraan *ecological citizenship*.

Tempat penampungan akhir semakin dangkal, tempat penampungan akhir air setiap tahunnya semakin dangkal dan menyempit akibat tidak terawat. Desa Sumberjo memiliki belasan sungai yang dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan menampung air dari beberapa tempat, namun karena kurang terawatnya tempat tersebut sehingga tidak dapat menampung air secara maksimal. Perlunya kesadaran masyarakat dan pemerintahan desa untuk melakukan gotong royong membersihkan dan merawat penampungan air atau waduk agar kembali berfungsi dengan baik. Selain itu, pemerintah desa seharusnya memperluas tempat penampungan air tersebut yang disebabkan oleh penyempitan. agar ketika air yang ada di tempat tersebut bertambah tidak penuh dan meluber ke permukiman warga sehingga terjadi banjir. Permasalahn selanjutnya yaitu kebiasaan warga dalam membuang sampah sembarangan, kebiasaan tersebut disebabkan karena kurangnya lahan untuk membuang sampah di rumah ditambah perilaku malas untuk membakar sampah sehingga beberapa warga lebih memilih untuk membuang sampah di sungai dan di lahan kosong. Banyaknya sampah warga di area sungai dan lahan kosong menjadikan air yang seharusnya mengalir deras ketempat penampungan air akhir menjadi tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir di area permukiman warga. Perlunya ketegasan pemerintah desa dalam menangani permasalahan ini, agar masyarakat jera sehingga membuang sampah pada tempatnya.

Pengeboran secara besar-besaran yang dilakukan oleh warga yang memiliki sawah untuk mengairi sawah, karena tidak ada hujan dengan rentan waktu yang cukup lama mengakibatkan tanah persawahan kering dan gagal panen, saluran irigasi sawah yang ikut kering sehingga warga melakukan perairan dengan menggunakan bor besar di area persawahan setiap hari. Karena sumber air di desa menggunakan bor kecil membuat sumber air yang di desa kalah dengan yang ada disawah sehingga air yang ada di desa tidak lagi keluar. Dari permasalahan ini pihak desa membuat kebijakan baru untuk menanggulangi kekeringan yang mengakibatkan warga kekurangan air bersih yaitu dengan cara membuat saluran air bersih melalui pipa ke warga yang terdampak. Namun solusi tersebut dinilai kurang efektif karena tidak berupa pencegahan atau tidak mempunyai efek jangka panjang. Selain kekeringan Perburuan liar masih sering terjadi hingga saat ini, perburuan liar pada hewan

mengakibatkan hilangnya populasi hewan di hutan sehingga terjadi tidak seimbangnya ekosistem hutan. Perburuan liar dilakukan oleh orang yang berada di daerah desa hutan ataupun luar daerah desa hutan dengan sebagian besar memburu kijang, babi hutan, burung dan ular. Beberapa tahun lalu hutan didaerah Sumberjo terdapat bermacam-macam hewan didalamnya namun seiring berjalannya waktu akibar perburuan liar yang didominasi orang dari luar desa mengakibatkan hilangnya hewan-hewan yang ada di hutan.

Penelitian ini menggunakan teori *behavior-setting* (setting perilaku) yang dipelopori oleh Robert Barker dan Alan Wicker. Dimana di desa Sumberjo setting perilaku masyarakat yang diciptakan oleh pemerintah desa, berupa program-program dan peraturan dalam menciptakan kelestarian lingkungan. dengan adanya program-program yang diciptakan, masyarakat diharapkan dapat turut aktif dalam kegiatan kelestarian alam sehingga dapat membentuk *ecological citizenship* pada warga Sumberjo. Peran dari pemerintah desa maupun pusat sangat diperlukan guna menyadarkan masyarakat agar terlibat aktif dalam menanggulangi bencana dan permasalahan alam yang terjadi di desa Sumberjo. Selain upaya-upaya berbentuk program, peraturan juga sangat penting untuk mendukung berjalannya program tersebut. Peraturan yang tegas dan bersifat memaksa dapat memberi efek jera kepada warga sehingga warga yang melanggar mendapat sanksi yang tegas. Selain hal tersebut sosialisasi juga sangat penting guna memberi pemahaman kepada warga untuk menjaga lingkungan alam sekitar guna tercapainya *ecological citizenship* di desa Sumberjo.

Pemerintah desa beserta Perum Perhutani memiliki peran yang cukup penting dalam menyadarkan warga agar menjadi warganegara yang sadar terhadap lingkungan dan ikut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada disekitarnya. Selain karena mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi mereka juga memiliki pemahaman lebih terkait lingkungan alam, sedangkan Perum Perhutani memiliki wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan terhadap hutan di wilayah kerjanya. Perhutani sebagai seorang yang memiliki pemahaman terhadap pendidikan kelestarian lingkungan wajib memberikan edukasi kepada warga sekitar terkait pendidikan pelestarian lingkungan baik di lingkungan desa ataupun lingkungan hutan. Hasil wawancara pada 10 Oktober 2020 dengan Imam Sugondo sebagai ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan wawancara pada 18 Februari 2021 dengan Teguh kepala desa Sumberjo menjelaskan upaya-upaya yang diberikan oleh Perum Perhutani dalam pelestarian lingkungan berbasis

ecological citizenship di desa Sumberjo diantaranya: bantuan bibit pohon, system tebang tanam, penanaman pohon di tepi jalan, bersih- bersih lingkungan, sosialisasi kebersihan lingkungan, Perdes (Peraturan Desa), pembuatan *green house*, Edukasi penanaman pohon pada anak-anak, dan saluran pompa air bersih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelestarian alam di desa Sumberjo belum berjalan, hal tersebut terjadi karena hasil dari program yang diberikan tidak sesuai dengan teori Robert Barker dan Alan Wicker. Dimana dalam teori ini perilaku manusia merupakan bagian dari kompleksitas ekosistem (Hawley dalam Himmam & Faturochman, 1994), yang mempunyai beberapa asumsi dasar sebagai berikut: a.) Perilaku manusia terkait dengan konteks lingkungan. dari program-program yang diberikan oleh pemerintah terkait sudah memenuhi syarat. seperti kegiatan warga dalam penghijauan, bersih-bersih lingkungan, edukasi penanaman terhadap anak, *green house* dan lain-lain. Namun, dari waktu pengaplikasiannya warga tidak turut aktif dalam program- program tersebut sehingga program tersebut tidak berjalan dengan baik. hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terkait lingkungan masih pasif sehingga kelestarian alam di desa Sumberjo belum berjalan. b.) Interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia – lingkungan. dalam konteks ini, dari program-program yang dibuat sudah menunjukkan simbiosis mutualisme antara manusia dan lingkungan. yangmana masyarakat menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar dan hutan dengan cara reboisasi di wilayah hutan, mematuhi peraturan desa dll. dengan hal tersebut akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat sekitar baik jangka pendek maupun panjang seperti mencegah terjadinya banjir, kekeringan, tanah longsor dan mengurangi pemanasan global. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi lapangan tidak sesuai dengan program yang diberikan, perilaku masyarakat masih pasif dengan program lingkungan didukung dengan kurang tegasnya sanksi yang diberikan sehingga masyarakat acuh terhadap program-program tersebut.

c.) Interaksi manusia - lingkungan bersifat dinamis. Hal ini juga tidak menunjukkan adanya perilaku masyarakat desa Sumberjo yang aktif dalam kegiatan lingkungan, masyarakat yang pasif lebih mementingkan bekerja daripada ikut serta dalam kegiatan yang diberikan oleh pemerintah terkait. Hanya ada beberapa warga yang aktif seperti mulsuliyanto salah satu pemuda penggerak edukasi penanaman pohon pada anak di Sanggar Gubuk Sinau. Dengan perilaku yang dilakukan mulsuliyanto diharapkan dapat menggerakkan warga lainnya agar turut aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan sehingga interaksi antara manusia dan

lingkungan dapat aktif dan berkembang sehingga *ecological citizenship* dapat terwujud. d.) Interaksi manusia - lingkungan terjadi dalam berbagai level dan tergantung pada fungsi. Seperti kegiatan edukasi penanaman pohon pada anak, kegiatan tersebut dilakukan pada level rendah yaitu pada anak-anak dengan fungsi mengajarkan anak sejak dini terkait kelestarian alam dengan harapan semua tindakan yang dilakukan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan. Program-program yang diberikan dalam konteks lingkungan sudah memenuhi kriteria, namun tetap saja perilaku masyarakat desa Sumberjo yang masih pasif dalam kegiatan lingkungan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait kelestarian lingkungan sehingga masyarakat belum mengetahui pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. dari hasil penelitian dilapangan ini dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat desa Sumberjo masih pasif tidak sesuai dengan teori Robert Barker dan Alan Wicker. Selain upaya-upaya yang telah diberikan pemerintah desa ataupun dari Perum Perhutani diperlukan juga kesadaran masyarakat dalam menjalankan program-program tersebut sehingga program dapat terlaksana dengan baik, adapun ketika masyarakat pasif perlunya ketegasan dari pihak terkait untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Ketika program-program yang diberikan berjalan maka permasalahan alam yang ada di desa Sumberjo akan teratasi, lingkungan menjadi bersih dan asri disitulah kewarganegaraan *ecological citizenship* tercipta. Namun pada kenyataannya upaya-upaya yang telah diberikan oleh pemerintah desa bersama perhutani tidak efektif dalam menanggulangi permasalahan alam yang ada di desa Sumberjo. Dari Sembilan program yang diberikan pemerintah desa, Perhutani ataupun pihak terkait lainnya hanya tiga program yang berjalan dengan lancar, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat serta kurang tegasnya pemerintah desa dalam menerapkan program-program yang diberikan memicu *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan teori Robert Barker dan Alan Wicker, Selain upaya-upaya yang telah diberikan pemerintah desa ataupun dari Perum Perhutani diperlukan juga kesadaran masyarakat dalam menjalankan program-program tersebut sehingga program dapat terlaksana dengan baik, adapun ketika masyarakat pasif perlunya ketegasan dari pihak terkait untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Ketika program-program yang diberikan berjalan maka permasalahan alam yang ada di desa Sumberjo akan teratasi, lingkungan menjadi bersih dan asri disitulah kewarganegaraan *ecological citizenship* tercipta. Namun pada kenyataannya upaya-upaya yang telah diberikan

oleh pemerintah desa bersama perhutani tidak efektif dalam menanggulangi permasalahan alam yang ada di desa Sumberjo. Dari Sembilan program yang diberikan pemerintah desa, Perhutani ataupun pihak terkait lainnya hanya tiga program yang berjalan dengan lancar, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat serta kurang tegasnya pemerintah desa dalam menerapkan program-program yang diberikan memicu *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan teori Robert Barker dan Alan Wicker, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara rancangan program lingkungan yang diberikan oleh pihak pemerintah terkait dengan perilaku yang diakomodasikan dalam lingkungan tersebut. Oleh karenanya, program-program tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum terwujud. Diharapkannya masyarakat dan pemerintah desa ataupun pusat bisa bersinergi dalam permasalahan yang terjadi sehingga terwujudnya *ecological citizenship* di desa Sumberjo.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 1) Kepada Perum Perhutani hendaknya setelah pemberian bibit pohon tidak langsung lepas tangan, namun harus diawasi sampai dengan proses penanaman dan pertumbuhan pohon, selain itu perlunya pengawasan ketat dan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum pencuri kayu. 2) Kepada LMDH Wono Asri hendaknya pembukaan lahan di area hutan dibatasi agar tidak terjadi hutan gundul dan seringnya sosialisasi kepada pengarang agar tetap menjaga kelestarian hutan. 3) Kepada Pemerintah Desa sebaiknya dalam penerapan program yang telah dirancang dipertegas dan diberi sanksi yang dapat memberi efek jera kepada masyarakat dan membuat program yang berkelanjutan terhadap masalah kekeringan yang terjadi didesa. 4) Kepada Masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi terhadap program-program yang telah dibuat. 5) Kepada Pemerintah Desa dan warga sekitar hutan membuat program terkait hutan yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat yang akan datang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, pemerintah desa bersama Perum Perhutani telah berupaya mengatasi permasalahan alam yang terjadi di desa Sumberjo dan berupaya untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melalui beberapa program seperti bantuan bibit pohon oleh Perum Perhutani, system tebang tanam daerah pembukaan lahan hutan, penanaman pohon ditepi jalan, bersih-bersih lingkungan,

sosialisasi kebersihan lingkungan, Perdes (Peraturan Desa) tentang pembuatan sumur bur, pembuatan *Green House*, edukasi penanaman pohon pada anak, dan pembuatan pompa air bersih. Tujuan penerapan program dengan melibatkan masyarakat agar masyarakat paham akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sehingga masyarakat ikut serta aktif dalam mengatasi permasalahan alam yang disebabkan karena perilaku mereka sendiri.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa bersama Perhutani dalam mengatasi permasalahan alam dan menciptakan warga negara yang sadar lingkungan atau disebut dengan *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman masyarakat terkait kelestarian lingkungan masih kurang dan didukung kurangnya ketegasan pemerintah desa dan Perum Perhutani dalam menerapkan sanksi yang tegas bagi warga yang tidak mengikuti program-program ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak terkait dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga permasalahan alam dan bencana alam yang disebabkan oleh factor manusia masih terjadi. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum berjalan.

Saran

Permasalahan alam dan bencana alam yang masih terjadi hingga sampai saat ini berarti dapat dikatakan *ecological citizenship* di desa Sumberjo belum berjalan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam kelestarian lingkungan serta kurang tegasnya pemerintah terkait dalam menerapkan program-program yang telah dibuat. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 1) Kepada Perum Perhutani hendaknya setelah pemberian bibit pohon tidak langsung lepas tangan, namun harus diawasi sampai dengan proses penanaman dan pertumbuhan pohon, selain itu perlunya pengawasan ketat dan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum pencuri kayu. 2) Kepada LMDH Wono Asri hendaknya pembukaan lahan di area hutan dibatasi agar tidak terjadi hutan gundul dan seringnya sosialisasi kepada pengarang agar tetap menjaga kelestarian hutan. 3) Kepada Pemerintah Desa sebaiknya dalam penerapan program yang telah dirancang dipertegas dan diberi sanksi yang dapat memberi efek jera kepada masyarakat dan membuat program yang berkelanjutan terhadap masalah kekeringan yang terjadi di desa. 4) Kepada Masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi terhadap program-program yang telah dibuat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses pengerjaan artikel dari tahap awal proposal, penelitian dan sampai penulisan artikel selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas ketersediaan informan dalam memberikan informasi-informasi dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwir, J. I. 2017. Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akutansi*. Vol. 3 No. 1, Hal 45.
- Barry, J. 2006. *Resistance Is Fertile: From Environmental To Sustainability Citizenship*. In, Andrew Dobson And Derek Bell (Eds.), *Environmental Citizenship*. Cambridge: Ma: The Mit Press.
- Buwono, S. T. 2020. *Kecamatan Widang Dalam Angka 2020*. Tuban: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban.
- Cipta, R. S. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Pati (Studi Terhadap Kasus Nomor 95/Pid.Sus/2017/Pn Pti Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Pati). *Undergraduate Thesis*. Universitas Islam Sultan Agung, Hal 02.
- Gusmadi, S. 2018. Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) Dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* .Vol. 9, No. 1, Hal 109.
- Helmi, A. F. 1999. *Beberapa Teori Psikologi Lingkungan*. Buletin Psikologi, Tahun Vii, No. 2, Hal 14.
- Itok Dwi Kurniawan, H. S. 2018. Ecological Citizenship Pada Masyarakat Kampung Naga Untuk Membangun Karakter Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018*.
- Jannah, R. 2018. Menciptakan Kewarganegaraan Ekologis Di Era Digital Melalui Kampong Recycle Jember. *Journal Of Urban Sociology*. Volume 1 / No. 2 /Oktober 2018.
- Luque, E. 2005. *Researching Environmental Citizenship And Its Publics*. *Environmental Politics* 14(2), Pp. 212-225.
- Mariyani. 2017. Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Hal 11.
- Nugroho, D. A. 2017. Penguatan Ecological Citizenship Melalui Penerapan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Berbasis Masyarakat. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, Hal 18.
- Nurmayanti, I. 2017. Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban Dalam Mengembangkan Ecological

Citizenship. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, Volume 05 Nomor 02 Tahun 2017, 83-97.

- Putra, H. E. 2016. Peran Perum Perhutani Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa Bendosari, Kecamatan Pujon Malang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang, Hal 01.
- Serlina Candra Wardina Sari, S. D. 2020. Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi Di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26, No. 1, Hal 87-107.
- Setiawan Gusmadi, S. 2019. Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 4, Nomor 2, Halaman 381-392.
- Siswanto, S. R. 2020. Prototype Wireless Sensor Network (Wsn) Sistem Pendeteksi Dini Kebakaran Hutan. *Jurnal Perspektif*, Vol. 4 No.2 Desember 2020 Hal 18.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan : Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, U. 2017. Peran Rubrik Persib Mania Dalam Meningkatkan Minat Pelanggan Pada Koran Harian Tribun Jabar Bandung. *Skripsi(S1) Thesis*, Perpustakaan, Hal 57.
- Szszzynski, B. 2006. Local Landscapes And Global Belonging: Toward A Situated Citizenship Of The Environment. In, Andrew Dobson And Derek Bell (Eds.),. *Environmental Citizenship*. Cambridge: Ma: The Mit Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (N.D.).
- Utami, N. N. 2015. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Assets Based Community Development. *Social Work Jurnal* Vol. 5 No. 2, Hal 176.